

TANTANGAN ETIKA PROFESI AKUNTAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PROYEK IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Rabiatul Adawiyah¹⁾, Dita Lestari²⁾, Wardah Syafirah³⁾,
Riska Ayu Purnama Dewi⁴⁾, Jihan Hafidzah⁵⁾

Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Sumbawa

Jihanhafidzah3@gmail.com

ABSTRACT

The development of Nusantara Capital City (IKN) as a national strategic project demands a high level of transparency and accountability, particularly in financial management. In this context, accountants play a vital role as guardians of financial report integrity and project governance. However, the complexity of large-scale projects such as IKN presents various ethical challenges for accountants, including potential conflicts of interest, external pressures, and the risk of financial information manipulation. This study aims to identify the ethical challenges faced by accountants in the IKN project and evaluate the extent to which the professional code of ethics provides guidance for ethical decision-making. A qualitative methodology was employed through literature analysis and interviews with accounting practitioners involved in government projects. The findings reveal that although ethical principles such as integrity, objectivity, and professionalism are used as guidelines, their implementation still encounters structural obstacles and a work culture that is not yet fully supportive. Therefore, it is necessary to strengthen oversight systems and provide continuous professional ethics education to ensure the role of accountants in supporting the accountability of the IKN development.

Keywords: *professional ethics, accountants, financial management, Nusantara Capital City, national strategic project*

ABSTRAK

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai proyek strategis nasional menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan keuangannya. Dalam konteks ini, akuntan memiliki peran vital sebagai penjaga integritas laporan keuangan dan tata kelola proyek. Namun, kompleksitas proyek berskala besar seperti IKN memunculkan berbagai tantangan etika bagi para akuntan, termasuk potensi konflik kepentingan, tekanan dari pihak eksternal, dan risiko manipulasi informasi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan etika yang dihadapi oleh akuntan dalam proyek IKN serta mengevaluasi sejauh mana kode etik profesi akuntansi mampu memberikan panduan dalam pengambilan keputusan yang etis. Metodologi yang digunakan adalah studi kualitatif melalui analisis literatur dan wawancara dengan praktisi akuntansi yang terlibat dalam proyek pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun standar etika seperti integritas, objektivitas, dan profesionalisme telah dijadikan pedoman, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan budaya kerja yang kurang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan pendidikan etika profesi yang berkelanjutan guna memastikan peran akuntan dalam mendukung akuntabilitas pembangunan IKN.

Kata kunci: etika profesi, akuntan, pengelolaan keuangan, Ibu Kota Nusantara, proyek strategis nasional

PENDAHULUAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek ambisius Pemerintah Indonesia yang tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permasalahan kepadatan dan beban berlebih di Jakarta sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia, serta menciptakan simbol peradaban baru yang mencerminkan kemajuan dan keberlanjutan. Dengan statusnya sebagai proyek strategis nasional, pembangunan IKN melibatkan alokasi anggaran yang sangat besar, keterlibatan banyak pemangku kepentingan, dan pengawasan dari berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola keuangan publik yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan.

Dalam konteks inilah, peran akuntan menjadi sangat vital. Akuntan tidak hanya bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, tetapi juga berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Profesi akuntansi menuntut pemegangnya untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam proyek berskala besar seperti IKN yang kompleks secara administratif dan politis.

Akuntan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan proyek IKN berada dalam posisi strategis yang rawan terhadap berbagai tekanan, baik dari segi kepentingan politik, tekanan institusional, maupun ekspektasi stakeholder. Tekanan semacam ini dapat menimbulkan dilema etika, di mana akuntan dihadapkan pada

pilihan sulit antara mempertahankan integritas profesional atau memenuhi tekanan eksternal yang bertentangan dengan prinsip etika. Selain itu, adanya konflik kepentingan, kurangnya pengawasan internal yang memadai, serta budaya organisasi yang lemah dalam penegakan nilai-nilai etis dapat memperparah potensi terjadinya penyimpangan dalam praktik akuntansi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai tantangan etika yang dihadapi oleh akuntan dalam pengelolaan keuangan proyek IKN. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menggali isu-isu utama yang muncul dalam praktik profesional, menelaah regulasi dan kode etik yang berlaku, serta mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai etika diterapkan dalam konteks nyata proyek pembangunan. Dengan memahami secara mendalam tantangan-tantangan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif dan relevan untuk memperkuat sistem etika profesi akuntan, meningkatkan integritas pengelolaan keuangan publik, serta mendorong terciptanya tata kelola proyek strategis nasional yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya penting bagi kalangan profesional akuntansi dan pengambil kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat luas sebagai bagian dari kontrol publik yang berhak atas penggunaan anggaran negara secara bertanggung jawab. Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan, pengarusutamaan nilai-nilai etika dalam pengelolaan keuangan proyek nasional seperti IKN menjadi bagian integral dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berdaya saing.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk menelaah isu-isu normatif dan konseptual yang kompleks, khususnya yang berkaitan dengan tantangan etika profesi akuntan dalam pengelolaan keuangan proyek strategis nasional, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, nilai, dan dimensi kontekstual yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data kuantitatif.

Studi literatur ini memfokuskan kajiannya pada berbagai dokumen dan sumber pustaka yang relevan. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup buku-buku ilmiah yang membahas tentang etika profesi, tata kelola keuangan sektor publik, dan profesionalisme dalam akuntansi. Selain itu, artikel dari jurnal nasional dan internasional yang mengkaji praktik dan pelanggaran etika dalam profesi akuntansi juga dianalisis untuk memperkaya perspektif. Dokumen-dokumen resmi seperti regulasi pemerintah terkait pembangunan IKN, laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Kode Etik Profesi Akuntan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) turut dijadikan sebagai referensi utama dalam menelusuri kerangka etika yang berlaku. Berita dan laporan dari media massa terpercaya turut dilibatkan sebagai pelengkap data kontekstual terkait implementasi proyek IKN dan isu-isu etika yang berkembang.

Seluruh sumber dipilih secara selektif berdasarkan prinsip relevansi, aktualitas, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap analisis. Literatur yang dipilih tidak hanya mencerminkan dasar teoritis semata, tetapi

juga menyajikan studi kasus konkret serta data empiris yang relevan dengan situasi nyata di lapangan. Dengan demikian, hasil telaah literatur diharapkan dapat mencerminkan dinamika yang terjadi dalam praktik, bukan sekadar representasi normatif.

Proses analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Tahapan analisis dimulai dari identifikasi isu-isu utama terkait etika profesi dalam pengelolaan keuangan proyek IKN. Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema tertentu, seperti independensi, integritas, objektivitas, dan akuntabilitas. Selain itu, analisis juga mencakup konteks eksternal seperti tekanan politik, konflik kepentingan, lemahnya pengawasan, serta budaya organisasi yang memengaruhi penerapan nilai-nilai etika. Penafsiran terhadap data dilakukan secara mendalam dan reflektif, dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang melingkupi proyek IKN.

Dalam proses ini, peneliti juga melakukan pembacaan kritis terhadap potensi dilema etika yang dihadapi akuntan, baik yang bersumber dari struktur institusi maupun dari relasi kekuasaan yang terbentuk dalam proyek strategis nasional. Penelaahan dilakukan untuk mengungkap sejauh mana kode etik yang ada mampu diimplementasikan secara nyata, serta faktor-faktor yang memperkuat atau menghambat profesionalisme akuntan di sektor publik.

Melalui pendekatan dan analisis tersebut, penelitian ini bertujuan menghasilkan kontribusi teoretis berupa pemahaman mendalam mengenai tantangan etika profesi akuntan dalam konteks pembangunan nasional. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi

pemerintah, lembaga pengawas, organisasi profesi, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan strategi yang dapat memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan proyek IKN dan proyek strategis lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek strategis nasional dengan skala dan kompleksitas yang sangat tinggi. Dalam konteks tersebut, peran akuntan menjadi semakin vital, bukan hanya dalam hal teknis pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi keuangan publik. Tantangan utama yang dihadapi akuntan dalam proyek sebesar IKN tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis, terutama ketika mereka harus menjalankan fungsinya dalam lingkungan yang penuh tekanan politik, kepentingan ekonomi, dan ekspektasi publik yang tinggi.

Salah satu tantangan utama adalah tekanan dari pihak eksternal, seperti atasan birokratis, pemegang kebijakan, atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap percepatan proyek dan realisasi anggaran. Tekanan semacam ini berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas akuntan, terutama ketika mereka dihadapkan pada permintaan untuk menyederhanakan, menunda, atau bahkan mengabaikan prosedur pelaporan demi kepentingan jangka pendek. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, yang mengutamakan integritas dan objektivitas sebagai pilar utama perilaku profesional.

Selain tekanan eksternal, budaya organisasi di sektor publik juga sering kali menjadi hambatan dalam penerapan etika profesi. Dalam beberapa kasus, budaya

kerja yang permisif terhadap pelanggaran, lemahnya sistem reward and punishment, serta kecenderungan untuk mencari “jalan pintas” dalam pengambilan keputusan keuangan menjadi tantangan tersendiri bagi akuntan yang berusaha menerapkan etika profesi secara konsisten. Lingkungan kerja yang tidak mendukung perilaku etis membuat akuntan berada dalam posisi sulit ketika harus memilih antara loyalitas kepada atasan atau integritas profesionalnya.

Sistem pengawasan internal dan eksternal juga menjadi aspek krusial dalam mendukung penerapan etika profesi. Dalam banyak kasus, lemahnya kontrol internal, minimnya audit yang independen, serta keterbatasan kapasitas lembaga pengawas membuat penyimpangan keuangan sulit terdeteksi sejak dini. Akuntan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan, justru sering kali berada dalam situasi dilematis karena tidak memiliki dukungan sistem yang kuat untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut terkena risiko pribadi atau tekanan balasan.

Selain itu, dalam konteks proyek IKN yang melibatkan kerja sama dengan sektor swasta dan pendanaan lintas instansi, konflik kepentingan menjadi tantangan serius. Akuntan yang bekerja di bawah instansi pemerintah namun berinteraksi langsung dengan pihak ketiga berisiko terjebak dalam posisi yang menimbulkan bias atau kompromi terhadap independensi. Hal ini menjadi perhatian utama karena laporan keuangan proyek tidak hanya menjadi dasar pengambilan keputusan internal, tetapi juga akan diaudit secara nasional, bahkan dapat diawasi oleh lembaga internasional.

Kode etik profesi akuntan telah mengatur secara jelas prinsip-prinsip yang harus dipegang, seperti integritas,

objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Namun, realitas menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai tersebut di lapangan masih belum optimal. Hambatan struktural seperti minimnya pelatihan etika, kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi etis dari tindakan profesional, serta rendahnya budaya pelaporan pelanggaran (whistleblowing) menjadi masalah yang masih harus dibenahi.

Literatur juga menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas etika melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, terutama bagi akuntan sektor publik. Pendidikan etika yang tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga aplikatif dapat membekali akuntan dengan kemampuan untuk mengenali dan mengatasi dilema etika yang kompleks. Selain itu, keberadaan sistem perlindungan bagi pelapor pelanggaran dan mekanisme pelaporan yang aman sangat diperlukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Dalam proyek sebesar IKN, akuntabilitas tidak hanya diukur dari kelengkapan laporan keuangan, tetapi juga dari proses pengambilan keputusan keuangan yang etis dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, partisipasi berbagai pihak—termasuk lembaga pengawas, masyarakat sipil, dan media—diperlukan untuk menciptakan pengawasan kolektif yang lebih efektif. Dengan sistem pengawasan yang terbuka dan integritas profesi yang terjaga, pembangunan IKN dapat menjadi contoh praktik pengelolaan keuangan negara yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN)

dihadapkan pada beragam tantangan etika yang kompleks dan multidimensional. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berasal dari faktor internal profesi, tetapi juga dari dinamika eksternal yang mencakup tekanan politik, ekspektasi pemangku kepentingan, serta struktur kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung integritas profesi akuntan. Tekanan kepentingan politik, konflik kepentingan, budaya organisasi yang permisif terhadap kompromi etis, serta lemahnya sistem pengawasan menjadi hambatan nyata dalam penerapan prinsip-prinsip etika seperti integritas, objektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Meskipun kode etik profesi akuntan telah disusun secara komprehensif oleh organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), realisasi penerapan kode etik tersebut dalam praktik masih menghadapi banyak kendala. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya pemahaman terhadap prinsip-prinsip etika, kurangnya pelatihan etika yang berkelanjutan, serta adanya ambiguitas dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran etika di sektor publik. Selain itu, pengelolaan proyek IKN yang melibatkan anggaran besar dan berbagai kepentingan lintas sektor juga menciptakan ruang abu-abu yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dan keputusan yang menyimpang dari nilai-nilai etika profesional.

Dalam konteks ini, upaya untuk memperkuat penerapan etika profesi akuntan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan memerlukan pendekatan sistemik dan holistik. Diperlukan penguatan regulasi dan sistem pelaporan keuangan yang transparan, peningkatan efektivitas pengawasan internal dan eksternal, serta komitmen dari lembaga-lembaga negara untuk menjaga

independensi profesi akuntan dari intervensi yang bersifat politis atau ekonomis. Pendidikan dan pelatihan etika secara berkelanjutan juga penting untuk membentuk kesadaran moral dan kapasitas profesional akuntan agar mampu menghadapi dilema etika dengan bijak dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, pembangunan IKN bukan semata proyek fisik dan infrastruktur, tetapi juga merupakan ujian bagi integritas tata kelola keuangan negara. Peran akuntan dalam proyek ini sangat strategis, bukan hanya sebagai teknisi pencatat transaksi, tetapi juga sebagai penjaga moral yang memastikan bahwa setiap pengeluaran dan pengambilan keputusan keuangan dilandasi oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar etika. Menghadirkan akuntan yang profesional dan berintegritas menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan proyek IKN yang bersih dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan etika profesi merupakan fondasi krusial dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2022*. <https://www.bpk.go.id/>

Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Kode etik akuntan Indonesia*. Dewan Standar Etika Profesi IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Pedoman etika profesi akuntan sektor publik*. IAI-KAPd.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

Muhammad, R., & Indriani, D. E. (2020). *Etika profesi dan pengaruhnya*

terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 15(2), 88–101.

Susanto, A., & Meiryani. (2019). *Ethics in public sector accounting: Challenges*

and solutions. International Journal of Ethics and Systems, 35(3), 315–330.
<https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2018-019>